

Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan

Dr. Zakariya Anwar, M.Si dan
Wahyuni, S.Sos., M.Si
sahidwahyuni@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan, yang luas wilayahnya 70% merupakan lautan yang terkandung potensi ekonomi yang cukup melimpah, antara lain sumber daya ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya, dengan melimpahnya sumber daya ini maka seharusnya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam realita yang terjadi tidaklah demikian. Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka sangat memprihatinkan karena sebagai nelayan tradisional yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin mereka seringkali dijadikan obyek eksploitasi oleh para pemilik modal atau para pedagang tengkulak, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Berdasarkan uraian ini, maka rumusan masalah adalah:

- 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan?*
- 2. Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan?.*

Tulisan ini menggunakan metode library research dengan menggunakan buku-buku yang terkait dengan tema tulisan, yang menunjukkan bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan yaitu faktor struktural disebabkan oleh faktor atau variabel internal individu yaitu struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber alam. Dan faktor kultural disebabkan karena variabel yang melekat, menjadi gaya hidup tertentu yang menyebabkan individu sulit keluar dari kemiskinan. Variabel kemiskinan kultural ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, ketaatan pada pandangan tertentu.

Kata Kunci: Kemiskinan, Nelayan

Pendahuluan

Berbagai hasil kajian penelitian selama ini tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan telah mengungkapkan bahwa sebagian besar mereka tergolong nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil yang hidup dalam kubangan. Kemampuan mereka memenuhi kehidupan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, diantara beberapa jenis kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari sangat berperan besar untuk menjaga kelangsungan hidup mereka (Muyarto dkk, 1984; Kusnadi, 2002).

Walaupun para nelayan tradisional mengambil peranan yang signifikan dalam meningkatkan produktifitas perikanan nasional, tetapi hal tersebut tidak membawa korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Kehadiran program-program intervensi pembangunan, khususnya untuk masyarakat pesisir seperti program PEMP atau proyek Co-Fish, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), merupakan wujud pengakuan adanya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan. Kebijakan modernisasi perikanan yang mulai digelar intensif pada awal tahun 1970-an untuk meningkatkan produktifitas perikanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ternyata belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap nasional yang besarnya mencapai 6,4 ton pertahun sudah dieksploitasi, apakah hal ini secara otomatis membawa implikasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, padahal, sekarang tingkat pemanfaatan potensi lestari tersebut sudah mencapai 4,4 juta ton pertahun, sehingga tinggal 2,0 juta ton yang belum dieksploitasi. Berdasarkan fakta-fakta lapangan, paradigma produktivitas tangkapan sebagai solusi alternative untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sekaligus mengatasi kemiskinan nelayan harus dikaji ulang dan ditempatkan sebagai salah satu strategi yang penerapannya disesuaikan dengan kondisi lokal. Reorientasi pemikiran ini penting untuk membuka ruang yang luas bagi upaya menggagas beberapa strategi lain untuk menangani kemiskinan masyarakat nelayan sehingga bersifat komprehensif, multidimensional, konseptual, dan visioner.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan? dan Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan?

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan

Begitu banyak pengertian kemiskinan, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan. Baik dilihat

dari segi ekonomi, maupun secara sosial dan budaya Menurut perspektif sosiologi, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2006). Kemiskinan adalah ciri yang sangat menonjol dari kehidupan masyarakat pesisir yang masih enggan menjauh dari kehidupan nelayan.

Mereka adalah salah satu kelompok sosial penduduk atau komunitas yang selama ini terpinggirkan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik dan teridentifikasi miskin dan terendah pendapatannya di samping petani sehingga wajar orang mengistilahkan mereka sebagai *the poorest of the poor*. Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan (Kompas.com, 2019).

Masyarakat nelayan yang sumber pendapatannya berbasis perairan merupakan bagian integral dari bangsa ini yang dapat menjadi ujung tombak pemberdayaan sumber daya sub sektor perairan dan kelautan dalam mengisi pembangunan ekonomi nusantara. Peran sebagai ujung tombak dalam mengisi pembangunan tersebut hanya dapat terwujud jika peranannya diberdayakan, diakui, dilindungi, dan ada jaminan kepastian hukum yang berpihak kepada mereka yang sumber utama penghidupannya dari perairan.

Selain tantangan alam yang dihadapi nelayan sangat berat (musim), pola kerja homogen yang bergantung hanya pada satu sumber penghasilan, berbagai persoalan lain yang mendera kaum nelayan dan menjadi persoalan keterpurukan klasik. Kemampuan modal yang lemah, permainan harga jual ikan, dan terbatasnya daya serap industri pengolahan ikan masih terjadi persoalan yang tak pernah terselesaikan. Selain dari itu, kekuatan canggih armada tangkap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan hasil tangkapan serta belum adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka menjadi persoalan dalam daya saing nelayan kecil dan tradisional hingga hari ini.

Kehidupan mereka sangat memprihatinkan karena sebagai nelayan tradisional yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin mereka seringkali dijadikan obyek eksploitasi oleh para pemilik modal atau para pedagang tengkulak, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Teknologi yang digunakan oleh mereka pada umumnya masih bersifat tradisional. Oleh karena itu, produktifitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Gejala modernisasi perikanan tidak hanya membantu bahkan membuat nelayan tradisional terpinggirkan, seperti munculnya kapal tangkap yang berukuran besar dan teknologi modern. Mereka mampu menangkap ikan lebih banyak dibanding dengan nelayan tradisional yang hanya menggunakan teknologi tradisional.

Menurut data Kementerian Perhubungan jumlah nelayan tersertifikasi per-Februari 2019 jumlahnya telah mencapai 232.414 (Kompas.com; 2019), namun dalam 10 tahun terakhir

jumlah nelayan berkurang 25%. Sekarang jumlahnya 2,8 juta kepala keluarga nelayan tangkap di laut. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya jumlah nelayan berdasarkan temuan dari beberapa daerah. Pertama, karena kebijakan yang tidak menguntungkan, karena memang ada pengabaian baik oleh pemerintah maupun industri yang melakukan pencemaran di laut. Kedua ada yang disebut dengan praktek pengusiran. Ini jelas sekali dilihat di kawasan industri pariwisata dimana nelayan-nelayan tidak boleh menangkap ikan dengan alasan wilayah pariwisata. Sedangkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 menunjukkan, jumlah nelayan di Indonesia berjumlah 2,7 juta orang. Jumlah tersebut mayoritas berada dalam ambang batas kemiskinan dan menyumbang 25 % angka kemiskinan nasional.

Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan perlengkapan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Kehidupan sehari-hari mereka lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri, hasil yang dijual lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan dan bukan diinvestasikan kembali untuk mengembangkan skala usaha. Kondisi nelayan tradisional setidaknya disebabkan oleh keterbatasan sarana, masih rendahnya sumber daya manusia, dan belum adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka. Hal tersebut merupakan rangkaian permasalahan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Sebab, dengan minimnya peralatan penangkapan ikan yang dimiliki, maka tingkat produktivitasnya pun sangat terbatas, yang pada gilirannya sangat berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan (Supriharyono. 2000).

Berbeda dengan kondisi nelayan di Jepang, meskipun mereka secara sosial rendah dan marjinal tetapi secara ekonomi dan politik mereka mendapatkan perhatian dan perhitungan sehingga kebijakan pembangunan banyak yang pro kepada nelayan. Pada umumnya nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil dengan permodalan tenaga dan perlengkapan tangkap sederhana serta pendidikan rendah. Peran tengkulak atau tauke cukup besar dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, baik dalam kegiatan produksi, pemasaran, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sesungguhnya terdapat dua dimensi kemiskinan (Prayitno dan Budi Santoso, 1996) yaitu: (1) kemiskinan multi dimensional, berupa miskin akan aset-aset, pengetahuan/keterampilan, tidak memiliki sumber dana dan akses informasi. Kemiskinan ini memanifestasikan diri dalam bentuk kurang gizi, air dan perumahan yang tidak sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik serta pendidikan yang sangat rendah, (2) Aspek kemiskinan yang muncul dari faktor manusianya, baik secara individu dan kolektif.

Kedua jenis kemiskinan tersebut tampaknya yang dialami nelayan hingga saat ini karena kemiskinan nelayan Indonesia sangat dipengaruhi perlakuan pengelolaan *resource* yang menempatkan sektor perikanan/kelautan nelayan sebagai areal pengurusan (*massive backwash*) dari sektor lain atau penduduk lainnya yang tidak berdomisili di kawasan pesisir/pantai, karena faktor penguratan wilayah/pesisir inilah yang menyebabkan wilayah fisik

nelayan selamanya kumuh dan pemukiman penduduknya juga sangat tidak memenuhi standar kualitas hidup yang sehat.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan

Program pemerintah yang sedang berjalan yaitu kebijakan *pro-poor* yang tentunya juga diarahkan pada perbaikan hidup nelayan dan keluarganya, pemerintah mengklaim jumlah penduduk miskin di negeri ini mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% dari jumlah penduduk keseluruhan. Salah satu akar kemiskinan masyarakat nelayan adalah keterbatasan mengakses permodalan, keberpihakan sektor perbankan ke sektor perikanan masih dilihat sebagai penuh resiko, dan anggaran yang kecil. Kebijakan-kebijakan yang tidak *pro-poor* untuk mengubah nasib nelayan. Bahkan secara politik, nelayan masih sering dijadikan obyek mobilisasi massa untuk kepentingan politik.

Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multi dimensional, baik dilihat dari aspek struktural maupun aspek kultural. Menurut Nikijulw dalam Suharto Edi bahwa, kemiskinan sebagai indikator ketertinggalan masyarakat pesisir dan nelayan disebabkan oleh 3 hal: kemiskinan struktural, super natural, dan kultural.

Kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor atau variabel internal individu yaitu struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber alam. Semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel tersebut maka kemiskinan semakin berkurang. Sedangkan kemiskinan struktural (Suharto Edi, 2007) adalah kemiskinan yang di derita suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Dengan demikian kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana dialami oleh suatu masyarakat yang penyebabnya bersumber pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat miskin itu sendiri. Kemiskinan struktural yang disebabkan karena variabel kebijakan makro yang tidak atau kurang berpihak pada pembangunan masyarakat nelayan berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan dalam proyek pembangunan. Keinginan dan kemauan pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki komitmen kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin nelayan dibutuhkan dalam mengatasnamakan masalah ini.

Kemiskinan kultural disebabkan karena variabel yang melekat, menjadi gaya hidup tertentu yang menyebabkan individu sulit keluar dari kemiskinan. Variabel kemiskinan kultural ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, ketaatan pada pandangan tertentu (Suharto Edi, 2007).

Mulyadi (2007) membagi empat masalah pokok yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu: (1) kurangnya kesempatan (*lack of tunity*) (2) rendahnya kemampuan (*low of copability*) (3) kurangnya jaminan (*low level securty*) (4) keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik

sehingga menyebabkan kerentanan (*vulnerability*), keterpurukan (*voice lessness*), dan ketidakberdayaan (*power lessness*) dalam segala bidang.

Terdapat 4 juta kepala keluarga masyarakat pesisir yang bermukim di 8.090 desa, ternyata 32 % hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 300 ribu per bulan atau tergolong miskin. Meski disadari bahwa permasalahan nelayan dan kemiskinan bukanlah terjadi hanya di negara berkembang. Di negara maju sekalipun, kemiskinan nelayan akan timbul manakala terjadi kesalahan manajemen pengelolaan sumber daya perikanan.

Sebagai negara bahari dan kepulauan di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (*natural resource endowment*) di sektor kelautan dan perikanan melimpah. Sayangnya potensi sumber daya laut yang luasnya mencapai 70% (5,8 juta km persegi) luas teritorialnya jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber daya darat (kehutanan) yang luasnya hanya 1,31 juta km persegi, belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya kaya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Laut Indonesia juga bersumber mineral dan energi terbarukan. Lebih ironis, nelayan dan masyarakat pesisir, adalah yang termiskin dalam strata sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Fakta ini menguatkan sinyal bahwa pembangunan Indonesia masih berorientasi di darat.

Negara-negara Asia, termasuk Indonesia adalah negara maritim yang memiliki peranan dan andil penting dalam perekonomian dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah baik dari sumber daya hayati, maupun non-hayati, idealnya Indonesia membuktikan bahwa dia merupakan negara terbaik dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi kepulauan dan kelautannya. Namun secara kasat mata yang terjadi justru *under developed condition* pada sektor ini. Hal ini mengidentifikasi perhatian, dukungan, perencanaan program, dan *budget* pemerintah terhadap sektor ini masih dipandang sebelah mata.

Menurut Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu: sumber daya manusia, unit penangkapan ikan, dan sumber daya ikan. Secara umum dan menjadi potret kehidupan nelayan Indonesia, yaitu nelayan kecil bermodalkan tenaga dan peralatan penangkapan ikan sederhana, berpendidikan rendah, minim pengetahuan dan informasi, menjadi perasan tengkulak/tauke cukup besar dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, baik dalam kegiatan produksi, pemasaran, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kusnadi (2003) menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan bukanlah suatu independen, melainkan akibat kebijakan masa lalu yang terlalu terkonsentrasi pada pembangunan wilayah darat (*maritime orientation*) sehingga menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*).

Masyarakat pesisir Indonesia, khususnya nelayan skala kecil dan buruh nelayan memiliki problem hidup dan ritme kehidupan yang khas. Selain dihadapkan pada keadaan alam yang keras, masyarakat pesisir yang umumnya didominasi oleh kelompok masyarakat nelayan yang

masih berkuat dalam permasalahan di bidang ekonomi. Banyak desa-desa pesisir letaknya terpencil, sehingga program-program pembangunan belum menjangkau daerah tersebut. Kemiskinan sering pula menjadi lingkaran setan (*vicious circle*) dimana mereka juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan pesisir.

Ketika sumber daya ikan diupayakan dan menjadi kegiatan ekonomi dan meningkatkan permintaan ikan berdampak positif secara ekonomi terhadap kesejahteraan nelayan, desakan ekonomi cenderung membuat masyarakat pesisir mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan (*over exploitative*) dan kurang ramah lingkungan sehingga merusak kelestarian alam dalam jangka panjang akan memarjinalkan masyarakat itu sendiri.

Menjadi suatu ironi bagi bangsa Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya ikan laut yang diperkirakan mencapai 6,7 juta ton pertahun justru kantong-kantong kemiskinan banyak terletak dipemukiman nelayan. Nelayan tradisional yang berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa sampai saat ini menjadi komunitas terpinggiran dan masih terkuat pada lingkaran kemiskinan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, baik secara ilmiah, struktural maupun kultur yang bersifat sangat kompleks serta kondisi alam yang sangat sulit diprediksi serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit.

Ketergantungan terhadap musim sangat tinggi yang tidak menguntungkan nelayan secara riil rata-rata pendapatan perbulan semakin kecil. Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural, yakni kemampuan modal yang lemah, permainan harga jual ikan, jeratan utang ke tengkulak, dan terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan masih menjad persoalan keterpurukan klasik yang menderanya.

Kurangnya pemahaman pemanfaatan sumberdaya alam yang juga ditunjukan oleh rendahnya kepedulian masyarakat. Tidak banyak masyarakat pesisir sifatnya non-konsumtif seperti pemanfaatan untuk penahan banjir, pemanfaatan untuk obat-obatan, nilai estetika, dan lain-lain. Padahal nilai moneter non-konsumtif tersebut jauh lebih besar dari pada konsumtif yang sifat pemanfaatan secara langsung dalam perikanan dan mangrove.

Umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan sehingga wilayah jelajahpun menjadi terbatas. Kekayaan potensi alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadinya kepasrahan, dan ini berakibat tidak hanya meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan tradisional, dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal dan teknologi, dan gaya hidup yang boros. Sedangkan faktor eksternal berupa kebijakan perikanan yang lebih berorientasi kepada produktifitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial. Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, kerusakan ekosistem akibat

pencernaan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, terbatasnya peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa nelayan, kondisi fluktuasi alam yang tidak menentu (Kusnadi, 2006). Semakin kompleksnya permasalahan perikanan yang mengakibatkan kemiskinan nelayan semakin menjadi-jadi.

Salah satu faktor yang terpenting penyebab nelayan kurang memperoleh perhatian publik adalah kebijakan pembangunan yang selama ini tidak memperhatikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penentu masa depan bangsa. Akibat lebih lanjut adalah masyarakat kurang memiliki sikap simpati dan empati terhadap pergulatan hidup nelayan. Perhatian masyarakat secara bertahap mulai tumbuh setelah dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999. Namun demikian, dalam era otonomi daerah, misi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian yang serius bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Sifat kebijakan pemerintah dan perhatian masyarakat yang kurang, serta di tengah-tengah berbagai keterbatasan akses sosial, ekonomi dan politik, telah menjadikan komunitas nelayan mengembangkan mekanisme internal, strategi adaptasi, dan membangun kemampuan diri berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia di lingkungan agar bisa bertahan hidup. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai budaya sebagai masyarakat pesisir, nelayan memiliki sifat kemandirian yang tinggi dalam menghadapi gempuran tekanan hidup yang datang di setiap saat, karena kapasitas kemandirian ini mereka seperti menjadi “Komunitas tanpa negara”, sinis kepada aparat, dan berpotensi resisten terhadap kebijakan negara. Sikap-sikap demikian merupakan ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat nelayan yang sudah berlangsung cukup lama (Kusnadi, 2006, 2-4).

Tugas negara dan pemerintah pada masa sekarang dan masa mendatang adalah merajut kembali secara intensif pola-pola hubungan fungsional dengan nelayan, sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan memperoleh respon positif dan tanggung jawab dari masyarakat nelayan. Upaya demikian bisa ditempuh dengan jalan (1) merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan, khususnya pemerintah daerah, yang lebih peduli dan memihak kepentingan masyarakat nelayan serta, (2) merevitalisasi posisi dan peranan PPL perikanan di desa-desa nelayan agar mereka lebih berdaya guna dan berwawasan luas untuk meretas jalan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan secara terpadu dan berkelanjutan. Para PPL/PTL perikanan ini merupakan *development broker* yang bertugas menjadi jembatan kepentingan antara negara dan masyarakat nelayan dalam pembangunan masyarakat pesisir.

Konteks pembangunan kawasan pesisir atau aplikasi program intervensi pembangunan, antara lain program pemberdayaan masyarakat pesisir, sikap mandiri nelayan merupakan modal sosial-budaya yang sangat berharga untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Bila masyarakat nelayan atau masyarakat miskin manapun, modal sosial-budaya yang dimiliki

dapat berupa nilai-nilai: dapat menghargai diri sendiri dan sesama, etika sosial, agama dan kepercayaan, komunitas sosial, kerjasama, dan gotong-royong, nilai-nilai dan institusi sosial lokal yang ada menjadi tali pengikat pengelompokan sosial yang menandai eksistensi suatu masyarakat (Damanik, 2008.).

Modal sosial budaya merupakan identitas yang harus diidentifikasi dan dieksplorasi untuk dijadikan berbagai basis pembangunan masyarakat nelayan. Didalam modal sosial-budaya tercermin identitas dan harga diri suatu masyarakat sehingga memiliki nilai fungsional sebagai kekuatan internal pembangunan.

Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kemiskinan pada nelayan disebabkan oleh kemampuan modal yang lemah, permainan harga jual ikan, dan terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan, kekuatan canggih armada tangkap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal, dan terbatasnya penguasaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan hasil tangkap serta belum adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka dalam daya saing antara nelayan kecil dan tradisional hingga hari ini.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan yaitu dengan melakukan pembangunan yang bersifat terpadu pada kawasan pesisir, melakukan kerja sama dengan semua pihak khususnya melibatkan nelayan dalam pembangunan kawasan pesisir.

b. Rekomendasi

1. Pemerintah berkewajiban mendorong secara bertahap format kebijakan pembangunan nasional pada masa mendatang untuk lebih berorientasi pada pengembangan sektor kemaritiman nasional karena memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif dengan sumber daya yang lain. Dalam hal ini DKP dapat mengambil peranan utama.
2. Perlu koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program pembangunan antar unit kerja di internal instansi departemental, lintas departemental, atau antar pelaku pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan. Hal ini dapat meminimalisir ego sektoral atau ego instantional/ departemental, sehingga proses pembangunan berjalan efektif dan optimal.
3. Mendorong pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota pantai) merumuskan cetak biru (*blue print*) kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid, 1985, *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Dick Read, Robert, 2008, *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*, Mizan, Bandung.
- Damanik, Riza, Suhana, Prasetiamatati. 2008. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Faturochman, dkk. 2003. *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung
- _____, 2003, *Akar Kemiskinan Nelayan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Indonesia*, PT LKis Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Khodijah, *Peringkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan yang dikepalai Perempuan Studi Kasus Desa Malangprapat Kabupaten Bintan Kepulauan Riau*, International Journal of Scientific Engineering and Research, Jurnal Dinamika Maritim Vol.3 No.1 Edisi April Tahun 2013.
- LKIS, 2002, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, AR-Ruzz, Yogyakarta.
- Mayavanie Susanti, Dewi. 2010, *Peranan Perempuan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Midgley, James, 2005, *Pembangunan Sosial*, Ditperta Depag RI, Jakarta.
- Mulya, Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.
- Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Sara, H and P, Krishnan, 2006, *Poverty and Productivity in Female-Headed Households in Zimbabwe*, Faculty of Economics, University of Cambridge, Cambridge, Cambridge CB3 9DD the Journal of Development Studies July 2006.
- Tuwo, Ambo, DEA. 2001. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Brilian Internasional, Surabaya.